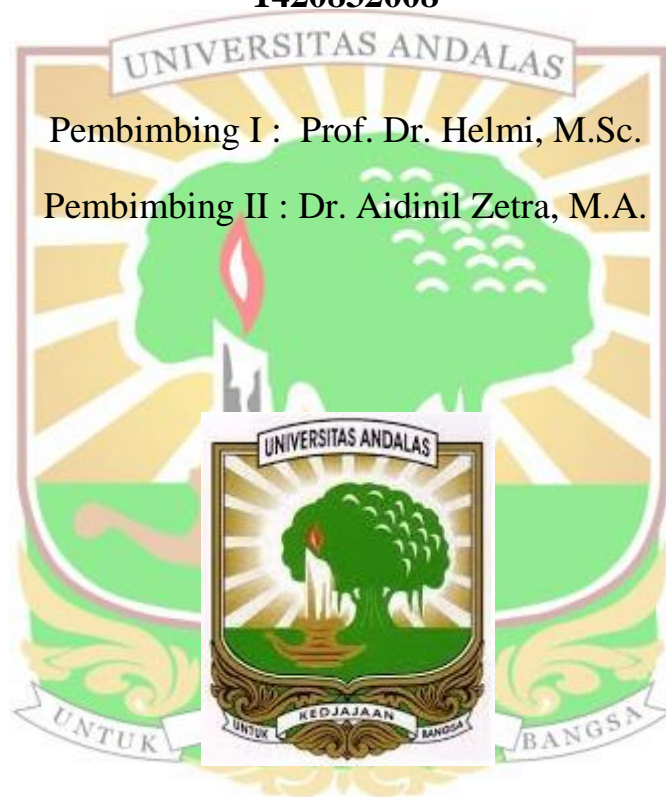


**POLITIK ANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD  
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2012**

**TESIS**

**OLEH :**

**RICE TRISNAWATI**  
**1420832008**



Pembimbing I : Prof. Dr. Helmi, M.Sc.

Pembimbing II : Dr. Aidinil Zetra, M.A.

**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2018**

## POLITIK ANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2012

1. Rice Trisnawati 2. Prof. Dr. Helmi, M.Sc. 3. Dr. Aidinil Zetra, M.A.  
Email : 1. [Chetrys\\_7@yahoo.com](mailto:Chetrys_7@yahoo.com) 2. [Helmi59pdg@yahoo.com](mailto:Helmi59pdg@yahoo.com) 3. [Azetra.2018@gmail.com](mailto:Azetra.2018@gmail.com)

Proses penganggaran merupakan aktivitas politik, yang merupakan alat pengawasan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Proses penganggaran akan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan terhadap proses penyusunan anggaran tersebut. Unsur-unsur tersebut tidak hanya dari Eksekutif tetapi juga Legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika Kontestasi Pengalokasian Anggaran Belanja Langsung dalam Penyusunan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2012. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang telah ditentukan dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi yang diambil membantu peneliti untuk memahami masalah penelitian. Lokasi yang diambil ditentukan dengan cara sengaja (*purposive*), dengan asumsi adanya masalah penyimpangan kepentingan anggaran yang terjadi di lapangan terkait politik anggaran dalam proses penyusunan APBD Kota Sungai Penuh tahun 2012. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Menurut *Teori Principal and Agent* Ada 4 (empat) Tahapan dalam Proses penganggaran yaitu : *Executive planning*, *Legislative Approval*, *Executive Implementation*, dan *Expose Accountability*. Berdasarkan hasil penelitian Dinamika Kontestasi Pengalokasian Anggaran Belanja Langsung dalam APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2012, yaitu sebagai berikut: Tercapainya hubungan intraksi yang saling berkoordinasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam proses penyusunan APBD, Dalam hal interdependensi masih ada dominasi suatu lembaga dalam perumusan sampai penetapan Peraturan Daerah dan Negosiasi (*lobbying*) masih kental terasa dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Lembaga legislatif (DPRD) tidak memiliki kewenangan untuk membuat rencana kerja, namun legislatif bisa merubah pagu anggaran maupun jenis kegiatan yang diinginkan anggota dewan, ini yang menyebabkan negosiasi negatif sering terjadi.

Kata Kunci : Politik Anggaran, APBD, Dinamika Politik

***Political Budget in Arranging Local Income  
and Expenditure Budget of Sungai Penuh Town in 2012***

1. Rice Trisnawati 2. Prof. Dr. Helmi, M.Sc. 3. Dr. Aidinil Zetra, M.A.  
Email : 1. [Chetrys\\_7@yahoo.com](mailto:Chetrys_7@yahoo.com) 2. [Helmi59pdg@yahoo.com](mailto:Helmi59pdg@yahoo.com) 3. [Azetra.2018@gmail.com](mailto:Azetra.2018@gmail.com)

*Budgeting process is a political activity that is the monitoring tool for society toward government. This process will involve various elements who have an interest in the budget arranging process. They are not only Executive element, but also Legislative. The purpose of this research is to define the dynamics of Allocation Budget Contestation of Direct Expenditure in Arranging Local Income and Expenditure Budget (APBD) of Sungai Penuh Town in 2012. This research is a descriptive research by using qualitative approach. The location is chosen to help the researcher to understand problem of research. The location is determined purposely and based on the assumption that there are distortions of interest about budgeting that happened in the field that related to Political Budget in Arranging Local Income and Expenditure Budget process of Sungai Penuh Town in 2012. The Location is in the Government of Sungai Penuh Town. Triangulation technique is chosen in this research because it uses some data from interview and documentation. According to Principal and Agent Theory, there are 4 stages in budgeting process. They are Executive planning, Legislative Approval, Executive Implementation, and Expose Accountability. Based on the result of this research, Dynamics of Allocation Budget Contestation of Direct Expenditure in Local Income and Expenditure Budget of Sungai Penuh Town are: 1) there is a Mutual Coordination Relationship between Executive and Legislative in Arranging Local Income and Expenditure Budget process. It starts from composing General Budget Policies –Provisional Budget Priorities and funding Levels (KUA-PPAS) and Integrated Work Plan and Budget (RKA) and the agreement between Mayor and Sungai Penuh Legislative. 2) In interdependence there is domination of an institution in arranging until determining Local Regulation. Domination is between Executive and Legislative. 3) Negotiation (Lobbying) evidences in Executive and Legislative relationship. Legislative doesn't have an authority to make work plan, but Legislative can change the budget even they can change the program that they want. It makes negative negotiation happens.*

*Key Words: Political Budget, Local Income and Expenditure Budget, Dynamics of Politic*